



## PROSIDING

# Konferensi Nasional Komunikasi

## Kemiskinan dan Budaya Konsumtif: Paradoks pada Masyarakat Indramayu

<sup>1</sup>Slamet Mulyana, <sup>2</sup>Meria Octavianti

Program Studi Manajemen Komunikasi Fikom Unpad

<sup>1</sup>*slamet.mulyana@unpad.ac.id*; <sup>2</sup>*meria.octavianti@unpad.ac.id*

### Abstract

Poverty and consumptive behavior are very contradictory; a paradox. Indramayu is one of the poorest districts in West Java, but on the other hand its people is consumptive. This research sought to describe the condition of poverty and consumptive behavior among some Indramayans. In addition, it also describes communication efforts to build public awareness on the impact of consumptive behavior. Case study was used to provide a complete and in-depth view of the subject under study. Research subjects were multi-sources, with key informants as many as ten people representing various circles of society in Sliyeg, Indramayu. Data was collected by in-depth interview, observation, and literature study. The results indicated that some figures of the Human Development Index (HDI) of Indramayu are much lower than the average of the HDI of the province or lower than the HDI of other regencies/cities in West Java. On the other hand, various consumptive behaviors develop in the society, which ultimately form the pattern of cultural poverty in Indramayu. The communication efforts to build awareness on the impact of consumptive behavior was done by involving various stakeholders, from bureaucracies, humanists, academics, clericals to local community leaders.

Keywords: poverty, consumptive culture, cultural poverty

### Abstrak

Kemiskinan dan budaya konsumtif adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang; sebuah paradoks. Kondisi itu terjadi di Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu kabupaten termiskin di Jawa Barat, tetapi di sisi lain masyarakatnya dikenal sangat lekat dengan budaya konsumtif. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kondisi kemiskinan dan budaya konsumtif yang ada di kalangan sebagian masyarakat Indramayu. Selain itu juga menjelaskan upaya-upaya komunikasi dalam membangun kesadaran masyarakat tentang dampak budaya konsumtif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sehingga bisa memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Subjek penelitian bersifat multi sources, dengan informan kunci sebanyak sepuluh orang yang mewakili berbagai kalangan masyarakat di Kecamatan Sliyeg Indramayu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu jauh lebih rendah dari rata-rata angka IPM provinsi atau lebih rendah dari angka IPM kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Di sisi lain berbagai budaya konsumtif berkembang di masyarakat, yang pada akhirnya membentuk pola kemiskinan kultural di Indramayu. Upaya komunikasi pemberdayaan untuk membangun kesadaran tentang dampak budaya konsumtif dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders, baik dari kalangan birokrasi, budayawan, akademisi, agamawan, maupun tokoh masyarakat lokal.

Keywords: kemiskinan, budaya konsumtif, kemiskinan kultural

## Pendahuluan

Indramayu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Pesisir Utara Jawa Barat. Didirikan Oleh Raden Aria Wiralodra, putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bagelen Jawa Tengah, pada hari Jumat Kliwon, I Muharram, 934 H atau I Sura 1449 S, yang menurut kalender Masehi adalah tanggal 7 Oktober 1527. *Titimangsa* tersebut resmi ditetapkan sebagai hari jadi Indramayu.

Indramayu hanya berjarak 200 km dari Jakarta sebagai ibukota negara, dan 130 km dari Bandung sebagai ibukota provinsi. Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 10 kecamatan dengan 35 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 114,1 Km, yang membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang. Dengan posisinya yang seperti ini, Indramayu menjadi satu titik strategis dalam lalu lintas perdagangan antarkota.

Lokasi wilayah yang strategis ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat Indramayu dan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dalam hubungan ini, kemiskinan bukan sekadar ketidakmampuan ekonomi tetapi juga tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi orang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Data kuantitatif menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indramayu proporsinya masih sangat tinggi, sekitar seperempat dari jumlah keluarga yang ada adalah keluarga miskin.

Kondisi tersebut diperparah dengan berkembangnya budaya konsumtif di kalangan sebagian warga Indramayu. Kebiasaan

menggelar pesta dalam berbagai acara adat keluarga seperti perkawinan, *sunatan* atau *rasulan* (khitanan untuk perempuan) biasanya memerlukan biaya besar untuk pelaksanaannya. Masyarakat rela menghutang ke sana kemari untuk mengadakan acara khitanan anaknya. Acara itu pun digelar besar-besaran dengan mengundang organ tunggal atau sandiwara yang dipentaskan dari siang hingga malam hari.

Salah satu upaya penanganan, dalam artian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak budaya konsumtif, yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu adalah melakukan komunikasi pemberdayaan yang dikoordinasikan oleh dinas instansi terkait berbagai komponen masyarakat, terutama kelompok sasaran utama yaitu keluarga. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan melibatkan berbagai *stakeholders* baik dari kalangan institusi pemerintah melalui dinas/instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh masyarakat. Penanganan masalah tersebut merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sehingga seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan memainkan perannya secara optimal. Mengingat faktor penyebabnya yang bersifat multifaktor, maka dalam upaya penanganannya haruslah ditujukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dengan melakukan kegiatan yang implementatif dan langsung dirasakan manfaatnya.

## Kerangka Teoritis

Komunikasi pemberdayaan dimaksudkan sebagai penyampaian pesan kepada sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media, untuk membangun kesadaran tentang masalah tertentu di masyarakat. Informasi yang disampaikan benar-benar ditujukan untuk kepentingan

masyarakat (Muhammad, 2008: 19). Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, 2002); *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Secara umum seperti dikemukakan Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik dan meningkatkan kesadaran pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. (Mulyana, 2002:41-42).

Sasaran awal dalam upaya komunikasi pemberdayaan adalah pemberdayaan keluarga, setelah itu baru pemberdayaan masyarakat. Hal itu didasarkan pertimbangan bahwa keluarga merupakan unit kesatuan sosial terkecil yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina anggota-anggotanya. Setiap anggota dari suatu keluarga dituntut untuk mampu dan terampil dalam menanamkan peranan sesuai dengan kedudukannya. Pada dasarnya, keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga sebagai institusi primer merupakan tempat pertama dan utama bagi anak sebelum mengenal lingkungan luar. Hartoyo (1987) seperti yang dikutip dalam Ritonga, dkk (1996: 15) menyatakan bahwa dalam pengertian yang lebih luas, keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan adopsi.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh sebagai makhluk sosial, sekaligus merupakan wahana pembentukan karakter. Mencermati fenomena budaya konsumtif masyarakat terlihat bahwa permasalahan tersebut bersifat kompleks dan terkait dengan etika, moralitas dan spiritual, kesulitan ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Bila fungsi keluarga bisa menguat, diharapkan dapat mengatasi masalah budaya konsumtif.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan dari penelitian ini menghendaki adanya pembahasan yang holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna di balik fakta empiris mengenai kemiskinan dan budaya konsumtif di kalangan masyarakat Indramayu.

Metode studi kasus digunakan dengan mempertimbangkan relevansinya untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti, yaitu kemiskinan dan budaya konsumtif di kalangan masyarakat Indramayu. Dalam studi kasus, peneliti mempelajari sebanyak mungkin data mengenai seorang individu, kelompok atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2001:201).

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber atau *key informan* dan dipilih secara purposif adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dan budaya konsumtif masyarakat, baik dari kalangan birokrat, akademisi, budayawan maupun tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sliyeg Indramayu, yang ditetapkan secara purposif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung. Selain itu juga, dilakukan peninjauan ulang dan penggunaan dokumentasi dengan menyandarkan pada konsep konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.

## Hasil Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup dua hal yaitu kondisi kesejahteraan masyarakat dan budaya konsumtif yang berkembang di Indramayu. Pada masyarakat Indramayu kedua hal itu berada dalam kondisi yang saling bertolak belakang. Pembahasan diakhiri dengan upaya komunikasi pemberdayaan untuk membangun kesadaran masyarakat.

### 1. Potret Kemiskinan di Indramayu

Saat ini, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah pada periode tertentu diformulasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Di Jawa Barat, IPM telah diresmikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia melalui penerbitan Perda no. 1 tahun 2001. Konsep IPM menyederhanakan kualitas kehidupan manusia dari tiga parameter: (a) indeks pendidikan (IP), (b) indeks kesehatan (IK), dan (c) indeks daya beli (IDB). Indeks pendidikan terdiri dari angka melek huruf (AMH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Indeks kesehatan terdiri dari angka harapan hidup (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). Sedangkan indeks daya beli diukur dari pendapatan masyarakat. Ketiga parameter itu melekat satu sama lain, dan bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat.

Sampai saat ini, Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, khususnya dalam hal pembangunan sumberdaya manusia. Hal ini bisa dilihat dari capaian angka

IPM Indramayu tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 1.1 yang menempati posisi terendah di Jawa Barat, dengan nilai hanya 69,52 pada tahun 2013 jauh di bawah angka rata-rata IPM provinsi yang mencapai 75,03. Bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di wilayah CIAYUMAJAKUNING, Indramayu merupakan kabupaten satu-satunya yang angka IPM-nya masih di bawah 70.

Tabel 1.1  
Angka IPM Kabupaten/Kota di Wilayah  
CIAYUMAJAKUNING Tahun 2013

NO	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Cirebon	75,83
2	Kab. Kuningan	72,21
3	Kab. Majalengka	72,02
4	Kab Cirebon	71,18
5	Kab. Indramayu	69,52
6	Prov. Jawa Barat	75,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Kondisi ini amat bertolak belakang dengan potensi sumber daya alam sebagai kekayaan daerah yang dimiliki Indramayu, baik sumberdaya migas, pertanian dan kelautan, luas dan letak geografis yang cukup strategis, dan sebagainya. Sumber daya alam yang beragam tersebut untuk beberapa hal belum banyak memberi kesejahteraan secara merata kepada sebagian besar penduduk di kabupaten ini. Dalam visi 'Indramayu Remaja' (Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera), peningkatan IPM secara tertulis dituangkan dalam visi "sejahtera". Sementara dalam misi 'Sapta Karya Mulih Harja', pembangunan sumberdaya manusia mendapatkan prioritas pertama dalam strategi makro pembangunan Indramayu.

Tabel 1.2  
Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu dan  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2013

Variabel IPM	2011		2012		2013	
	Indr	Jabar	Indr	Jabar	Indr	Jabar
IPM	68,40	72,73	68,89	73,11	69,52	75,03
Indeks Pendidikan	70,03	82,55	70,37	82,75	71,30	82,31
RLS	5,95	8,06	5,96	8,08	6,25	8,09
AMH	85,66	96,29	85,69	96,39	86,11	96,49
Indeks Kesehatan	70,38	72,34	71,07	72,67	71,23	72,99
AHH	67,23	68,40	67,64	68,60	67,74	68,80

Indeks Daya Beli	64,47	63,57	65,25	64,17	66,02	64,89
PPP (Ribuan Rupiah)	638,98	635,10	642,33	637,67	645,70	640,88

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Namun demikian, posisi Indramayu yang jauh tertinggal membuat upaya itu tidaklah mudah. Meskipun berbagai terobosan dan proyek-proyek mercusuar telah dilakukan, baik pada masa jabatan Bupati H. Irianto MS. Syafiuddin, tahun 2000 sampai 2010 maupun masa jabatan Bupati Anna Sophanah tahun 2010 - 2015, tampaknya kemajuan yang dicapai Kabupaten Indramayu dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Angka IPM hanya mengalami sedikit peningkatan dari 68,40 pada tahun 2011 menjadi 69,52 pada tahun 2013.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dijelaskan beberapa aspek yang membuat angka IPM Indramayu jauh lebih rendah dari rata-rata angka IPM provinsi atau lebih rendah dari angka IPM kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Pertama, indeks pendidikan di Indramayu masih merupakan yang terendah di Jawa Barat yang masih berada di angka 71,30. Indeks pendidikan merupakan akumulasi dari angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH). Meskipun telah terjadi kenaikan AMH dan RLS yang cukup signifikan pada tahun 2013, yakni sebesar 86,11 dan angka RLS menjadi 6,25 tetapi angka tersebut masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Dalam tiga tahun terakhir, kenaikan AMH hanya sebesar 0,45 poin dan kenaikan angka RLS hanya 0,3 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Indramayu, sampai saat ini, terdapat sekitar 14% penduduknya yang masih buta huruf dan rata-rata penduduk menyelesaikan pendidikannya hanya selama 6,25 tahun, yang berarti sampai kelas 1 SMP.

Kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan di Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor terutama faktor ekonomi dan faktor budaya. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indramayu yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Jumlah keluarga miskin terus bertambah, bahkan mencapai seperempat dari

total keluarga di kabupaten ini. Masyarakat Indramayu yang mayoritas agraris, sebagian besar (52 %) masyarakat Indramayu adalah petani, menambah tingginya angka kemiskinan di Indramayu tinggi. Melihat luas lahan pertanian Indramayu yang mencapai 120.000 hektar dan potensi hasil tangkap ikan di laut yang melimpah, seharusnya tidak ada rakyat yang miskin. Sayangnya, jika dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, maka lahan yang tersedia tidak cukup memadai, rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,3 hektar dan kebanyakan buruh tani, berakibat pada tingkat kesejahteraan yang mereka peroleh juga terbatas.

Faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan kemudian diperkuat faktor budaya, yang pada akhirnya membentuk pola kemiskinan kultural di Indramayu. Kebiasaan menggelar hajatan besar-besaran dan budaya konsumtif masyarakat juga merupakan salah satu penyebab bertahannya angka kemiskinan keluarga dan rendahnya pendidikan masyarakat. Pola berpikir kreatif dan produktif belum banyak dimiliki warga Indramayu sehingga mereka cenderung bergantung pada alam, tanpa ada upaya lebih. Bagi mereka, tanpa modal, usaha produksi tidak bisa berjalan. Selain itu, meski aliran dana *remittance* dari warga Indramayu yang bekerja di luar negeri per tahun mencapai Rp 300 miliar, atau lima kali pendapatan asli daerah Indramayu, tetap saja angka kemiskinan masih tinggi. Sebab, besarnya dana yang masuk malah digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, seperti memperbaiki rumah dan membeli perabot rumah tangga, bukannya dipakai untuk kegiatan produktif.

Indikator lain yang menyebabkan rendahnya angka IPM Indramayu adalah rendahnya indeks kesehatan masyarakat serta angka harapan hidup (AHH) penduduk. Seperti terlihat pada Tabel 1.2, indeks kesehatan masyarakat di Indramayu mengalami sedikit

peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,38 pada tahun 2011 menjadi 71,23 pada tahun 2013. Sementara AHH meningkat dari 67,23 pada tahun 2011 menjadi 67,74 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kualitas kesehatan masyarakat Indramayu. Akan tetapi angka-angka tersebut tetap masih di bawah angka rata-rata indeks kesehatan dan AHH provinsi yang mencapai angka 72,99 dan 68,80 pada tahun 2013.

Selain untuk mengejar ketertinggalan dalam indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menggenjot pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan pada dasarnya memiliki implikasi jangka panjang yang lebih luas. Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu bagian yang sangat fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan pendidikan dan kesehatan dikatakan dasar bagi pembangunan lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah untuk membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas jika diiringi dengan (a) penurunan angka pengangguran dan (b) distribusi pendapatan masyarakat yang lebih baik. Ada dua penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Pertama, menurut Kuznett (1955), adalah penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata. Ini biasa terjadi pada negara-negara yang baru tumbuh. Kedua, menurut Bartolini dan Rossi (1997), adalah distribusi tenaga kerja terampil. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat. Jadi, dari sisi ekonomi, pembangunan sektor pendidikan berperan dalam menciptakan tenaga kerja (dalam arti luas) terampil, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2. Budaya Konsumtif Masyarakat Indramayu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu masalah budaya yang dihadapi Indramayu, sejak dulu sampai sekarang, adalah budaya atau tradisi *luruh duit*. Tradisi inilah yang akhirnya membuat Indramayu dikenal sebagai daerah pengirim (*sending area*) buruh migran perempuan bahkan pelacur (PSK) di Indonesia. *Luruh duit* (mencari uang dengan mudah), yang bisa juga diartikan secara kasar sebagai pelacuran, dipandang sebagian masyarakat Indramayu sebagai solusi, jalan penyelemat, untuk keluar dari kemiskinan. Fenomena ini bisa dilihat terutama di Kecamatan Bongas, Karangampel, Juntinyuat, ataupun Sliyeg.

Tujuan dari warga yang *luruh duit* adalah untuk mencari kesugihan (kekayaan). Kekayaan merupakan representasi suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi, dan tidak kalah dengan orang lain. Selain itu, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan karena terbatasnya kesempatan kerja; di tengah keterbatasan kemampuan dan keahlian karena rendahnya pendidikan, di tengah himpitan kemiskinan karena tidak punya sawah atau lahan garapan maka *luruh duit* menjadi cara termudah untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Kekayaan diwujudkan dalam bentuk rumah yang bagus, pakaian yang modis, ataupun kendaraan yang dimiliki.

*Luruh duit* tidak selamanya menghasilkan kekayaan secara cepat. Ketika warga yang *luruh duit* gagal, kegagalan itu disikapi dengan *sikap nrimo* bahwa hal itu merupakan takdir atau nasib buruk. Biasanya mereka berhenti untuk sementara kemudian mencari cara lagi untuk meraih kesuksesan. Beberapa cara merspon kegagalan adalah dengan mencari dukun yang ampuh, menjadi

kuli, menjadi pembantu rumah tangga, atau mencari suami. Cara-cara irasional lebih banyak dipilih ketika kegagalan dialami, seperti dengan melakukan ritual-ritual aneh yang hasilnya sangat sulit dipertanggungjawabkan.

Di beberapa wilayah Indramayu, *luruh duit* merupakan kebiasaan turun temurun. Sebagai kebiasaan turun temurun, *luruh duit* menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat. Bahkan masyarakat sangat menerimanya. Selama ini, tidak ada sanksi sosial terhadap pelaku *luruh duit* karena dinilai sudah tradisi. Sebagian warga masyarakat memang ada yang sudah menyadari bahwa *luruh duit* merupakan kejahatan. Tetapi banyak juga yang menganggapnya tidak demikian. Mereka memandang *luruh duit* bukan kejahatan, tetapi pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang lainnya. *Luruh duit* sudah tidak dianggap sesuatu yang salah, bahkan bisa menjadi kebanggaan.

Berkembangnya budaya *luruh duit* pada sebagian warga masyarakat Indramayu berkaitan dengan pandangan mereka terhadap keberadaan perempuan, yang lebih banyak dilihat dari sisi fisiknya. Tradisi seperti *ngadongdot* (menawarkan anak perempuan kepada lelaki tertentu) atau *ngelanang* (melacurkan diri) pada hakekatnya adalah bentuk pemaknaan masyarakat terhadap tubuh perempuan yang dipandang sebagai *asset*, nilai tambah ataupun komoditas yang bisa dijual, bahkan itu dilakukan oleh orangtua atau suami. Pandangan ini pula yang menyebabkan kelahiran anak perempuan di beberapa wilayah di Indramayu lebih dihargai daripada kelahiran anak lelaki. Harapannya, anak perempuan nantinya bisa membalas 'bakti' kepada orang tua dalam bentuk kiriman-kiriman uang yang akan mengangkat harkat martabat keluarga.

Pola dasar yang terjadi biasanya adalah anak perempuan dalam usia yang sangat muda akan dinikahkan oleh orang tuanya, sebagai jalan keluar dari beban menafkahi keluarga yang harus ditanggung orang tua. Selanjutnya, karena secara fisik dan mental mereka belum siap, tidak lama kemudian pasangan muda itu akan bercerai. Si perempuan akan menyandang status

sebagai janda; janda muda atau lebih dikenal sebagai *janda kembang*. Status *janda kembang* akan meningkatkan nilai jual perempuan. Pandangan seperti itu masih sangat kuat di sebagian masyarakat Indramayu.

Temuan lain penelitian adalah berkembangnya secara turun temurun beberapa tradisi upacara adat di dalam keluarga berkenaan siklus hidup manusia, dimulai dari tradisi kehamilan sampai kelahiran, tradisi khitanan termasuk *rasulan* (khitanan untuk anak perempuan), tradisi perkawinan, dan tradisi kematian. Di antara tradisi tersebut, yang biasanya dirayakan secara khusus dengan menggelar pesta (*hajatan*) 'besar-besaran' yang cenderung mengeluarkan biaya banyak adalah tradisi sunatan, *rasulan*, dan perkawinan. Acara ini biasanya terjadi pada musim panen, ketika mereka memperoleh pendapatan lumayan dan sekaligus merupakan acara syukuran. Jenis hiburan pada saat *hajatan* menunjukkan tingkat status sosial ekonomi orang tua. Masyarakat kelas atas biasanya mengadakan hiburan orkes dangdut, tarling khas Indramayuan atau Cirebonan, Masyarakat kelas menengah dengan sandiwara, sementara masyarakat kelas bawah cukup organ tunggal.

Bagi orang Indramayu mengadakan *hajatan* khitanan atau perkawinan merupakan satu kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan; Ia akan merasa sangat malu dan terusik harga dirinya jika tidak melakukannya. Sikap seperti itu mendorong mereka untuk mencari upaya apa pun agar bisa melakukan *hajatan* khitanan atau perkawinan, bahkan dengan cara memaksakan diri misalnya dengan berutang.

Bersamaan dengan tradisi *hajatan*, berkembang juga kebiasaan (sistem) *buwuhan* yaitu kebiasaan terikat seperti arisan untuk membantu warga masyarakat yang akan mengadakan *hajatan*. *Buwuhan* umumnya dilakukan dalam bentuk beberapa warga yang mampu (punya uang atau beras atau kebutuhan *hajatan* lainnya) melakukan *magang* (meminjamkan) beras atau uang tersebut untuk kebutuhan *hajatan*. Menjadi kewajiban warga

yang *hajatan* untuk mencatat siapa saja yang magang, dalam bentuk apa, dan berapa banyak. Barang hasil *magang* harus dibayarkan kembali (*nyurtang*), sebesar minimal yang telah dipinjam atau bahkan dilebihi, ketika tetangga-tetangga ‘yang meminjamkan’ mengadakan *hajatan* di waktu yang lain.

Sistem *buwuhan* persis sama dengan sistem *gantangan* yang berkembang di wilayah kabupaten Subang. Sistem *buwuhan* secara tidak langsung pada akhirnya menjadi beban warga seperti halnya utang-piutang apalagi nilainya bisa sangat besar untuk ukuran masyarakat Indramayu, totalnya bisa sampai puluhan juta rupiah. Kondisi tersebut diperparah dengan budaya konsumtif yang memang merupakan karakter masyarakat Indramayu. Berkenaan dengan sistem *buwuhan*, tokoh masyarakat di Sliyeg, Kuwu Wartono menjelaskan,

“...*hajatan dan buwuhan memang tradisi leluhur yang berkembang di hampir seluruh wilayah Indramayu. Tradisi ini awalnya sebenarnya sih menurut saya baik...ya bentuk langsung dari gotong royong tapi lama-lama seperti bergeser maknanya, jadi seperti utang yang mau tidak mau harus dibayar kembali. Dan ini menyangkut harga diri warga di sini. Banyak warga yang seperti ini jadi terjerat ‘utang’ buwuhan ini....*”

Akibat dari tradisi *hajatan* dan sistem *buwuhan* banyak warga masyarakat di Indramayu, khususnya di Kecamatan Sliyeg, yang akhirnya seolah terjerat utang-piutang. Mereka harus selalu siap untuk melakukan *nyurtang* (membayar kembali) ketika tetangga yang melakukan *magang* mengadakan *hajatan* di waktu yang lain. Utang-piutang *buwuhan* bisa berlangsung dalam kurun waktu yang panjang sehingga mereka harus selalu siap sewaktu-waktu jika utang tersebut harus dibayarkan. Tradisi *hajatan* dan *buwuhan* sejalan dengan pola hidup konsumtif yang ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang merasa ‘sukses’ untuk berlomba-lomba untuk membangun rumah mewah dan membeli kendaraan.

*"Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya di daerah ini, bisa membangun rumah bagus atau membeli barang-barang mahal. Padahal uang tersebut disinyalir diperoleh dari anak-anak mereka, yang harus mencari nafkah sebagai buruh migran atau bahkan PSK, di kota-kota besar"*

Temuan berikutnya berkenaan dengan kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sebagian warga masyarakat Indramayu, khususnya kaum laki-laki terutama di wilayah pesisir Pantura, adalah kebiasaan mencari popularitas dan prestise dengan cara berfoya-foya. Tradisi *saweran* adalah salah satu contohnya. *Saweran* adalah kebiasaan untuk memberikan ‘uang tips’ kepada penyanyi atau penari di acara-acara hiburan dangdutan, tarlingan, atau bahkan di acara-acara tradisi yang juga diisi dengan acara hiburan atau pasar malam, seperti tradisi *ngarot* atau *nadran*. Semakin terkenal si penyanyi atau si penari, apalagi kalau primadona atau *sri panggung*-nya dan semakin memenuhi hasrat si lelaki, maka uang *sawer* pun akan semakin besar. Semakin besar uang *sawer* yang diberikan dianggap akan mengangkat popularitas dan prestise si lelaki.

Budaya luruh duit, tradisi ngadongdot dan ngelanang, juga budaya *hajatan* dan *buwuhan*, serta *saweran* pada masyarakat Indramayu mengerucut pada kuatnya budaya konsumtif, Sekalipun umumnya miskin, tetapi sebagian masyarakat Indramayu mempunyai gaya hidup konsumtif untuk mengejar *prestise* sosial.. Kenyataan itu dibenarkan oleh Soenarto Rois, pimpinan Yayasan As-Sakienah, yang merupakan seorang penduduk asli Indramayu.

*"Konsumtisme sudah menjadi budaya di sini! Maksud saya adalah kebiasaan masyarakat untuk menghabiskan sejumlah uang untuk prestise tertentu. Warga di sini biasa menggelar hiburan secara besar-besaran untuk hajatan pernikahan atau sunatan. Penyelenggaraan hiburan ini terkait*

*dengan prestise yang ingin ditunjukkan."*

*"Kalau yang mampu, hiburannya bisa sampai tujuh hari tujuh malam. Kalau yang biasa-biasa saja, paling satu hari satu malam. Bahkan ada yang terpaksa jual tanah atau bahkan berutang demi nanggap sandiwara."*

Temuan-temuan lapangan dalam penelitian ini, seperti sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa paradoks kemiskinan dan budaya konsumtif di Indramayu merupakan masalah yang kronis dan sangat kompleks. Dalam menangani dan menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sudah mempertimbangkan berbagai kondisi, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal, termasuk dalam sosialisasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nurhayati sebagai Ketua PSW Universitas Wiralodra Indramayu, secara lebih lugas mengatakan:

*"Ada ketimpangan struktur sosial yang melatarbelakangi, yakni kemiskinan dan kebodohan. Di Indramayu, diperparah problem kultural. Masalahnya justru dari orang tua atau keluarga. Keluarga miskin terjangkit sindrom ingin cepat kaya, lalu anak perempuan jadi alatnya. Biasanya, atas nama balas budi ke orang tua. Harus ada perubahan mindset."*

### **3. Komunikasi untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Kebijakan penanganan budaya konsumtif di Indramayu ditekankan pada upaya meningkatkan pendidikan dan perekonomian keluarga. Berkaitan dengan peran dan fungsi keluarga, kebijakan diarahkan pada penguatan kembali fungsi keluarga melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam delapan fungsi keluarga, seperti fungsi agama, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan cinta kasih.

Selain itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Tokoh pendidik, tokoh agama, atau tokoh masyarakat lainnya, bersama-sama aparat pemerintah termasuk aparat penegak hukum, harus bahu-membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi menimbulkan budaya konsumtif. Masyarakat harus mengingatkan agar mereka tidak mudah tergiur *iming-iming* kehidupan mudah atau mewah tanpa pekerjaan yang jelas, karena sesungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan mereka ke dalam berbagai masalah sosial

Berkaitan dengan penanganan budaya, pendidikan keluarga dan masyarakat memegang peran yang penting. Melalui kegiatan ini, informasi mengenai budaya konsumtif dan penanganannya dapat dilakukan dengan makin efektif. Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan masyarakat harus melihat konteks lokal dari daerah serta memanfaatkan potensi lokal di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menjadikan pendidikan sebagai program kegiatan yang menonjol dalam penanganan budaya konsumtif. Sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, pendidikan merupakan salah satu prioritas untuk melaksanakan misi mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini untuk menjawab empat tantangan pendidikan, sebagaimana data dari BPS Indramayu (2007: 3) yang ditandai dengan masih rendahnya: Pemerataan memperoleh pendidikan,; Kualitas dan relevansi pendidikan, Manajemen pendidikan, dan Efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Inti program ini adalah untuk mencegah anak-anak perempuan dilacurkan, dengan melakukan upaya-upaya: Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun non formal, Pemberian peluang kerja, dan Penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.

### **Kesimpulan**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indramayu dipengaruhi beberapa faktor,

terutama faktor ekonomi dan faktor budaya. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indramayu yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Jumlah keluarga miskin terus bertambah, bahkan mencapai seperempat dari total keluarga di kabupaten ini. Masyarakat Indramayu yang mayoritas agraris, sebagian besar (52 %) masyarakat Indramayu adalah petani, menambah tingginya angka kemiskinan di Indramayu tinggi.

Kemiskinan pada sebagian masyarakat kontradiktif dengan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, budaya konsumtif, membuat masyarakat melakukan cara apapun untuk memperoleh kekayaan. Faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan kemudian diperkuat faktor budaya, yang pada akhirnya membentuk pola kemiskinan kultural di Indramayu.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain; seperti benang yang sangat kusut dan sulit diurai. Kemiskinan yang dialami sebagian penduduk Indramayu, terutama kelompok petani di pedesaan membuat kesempatan mereka untuk memperoleh akses pendidikan menjadi sangat terbatas. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada munculnya berbagai bentuk permasalahan sosial. Pola berpikir kreatif dan produktif belum banyak dimiliki warga Indramayu sehingga mereka cenderung bergantung pada alam, tanpa ada upaya lebih. Bagi mereka, tanpa modal, usaha produksi tidak bisa berjalan.

Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait sehingga masalah kemiskinan dan budaya konsumtif di Indramayu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

### Daftar Pustaka

Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendikia.

Creswell, John W., 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among

Five Tradition. New York: sage Publications Inc. USA

Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publication

Isbandi, Rukminto Adi. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maxwell, Joseph A. 1996. Qualitative Research Design: An Introduction Approach. London: Sage Publication.

Muhammad, Arni. (2008). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara,

Mulyana, Deddy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Slamet, Duddy Zein, Agus Setiawan. 2017. *Communication Pattern of Woman Migrant Workers Family at Sliyeg Distric in Indramayu – West Java*. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Vol 2 (2): 92-96.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu, 2014. Indramayu Dalam Angka Tahun 2014

Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, 2014. Jawa Barat Dalam Angka 2014

Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi/Puslitfo BNP2TKI, 2012. Laporan Tahunan Kondisi dan Perkembangan Pekerja Migran.

Tim Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 2006 “Bergantung pada Tali Rapuh”